

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



**DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOJONEGORO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen Renja Perubahan ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan situasi, kebijakan, serta kebutuhan masyarakat. Perubahan Renja ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan umum APBD Perubahan serta prioritas dan plafon anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam dokumen ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang memfokuskan arah kebijakan perubahan pada program prioritas pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, penguatan sistem drainase, serta penataan ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan, kondisi riil di lapangan, serta aspirasi masyarakat.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pedoman yang operasional dan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang.

Bojonegoro, 31 Juli 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

KABUPATEN BOJONEGORO



RETNO WULANDARI, ST.MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19761015 200212 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 merupakan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan isu-isu strategis tahun 2024. Renja ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan isu-isu strategis tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2024 didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan isu-isu strategis tahun 2024 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini disusun dengan memperhatikan usulan prioritas dari Kecamatan yang disusulkan melalui Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD serta program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Bojonegoro.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga

berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Daerah 2005-2025 dan isu-isu strategis tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041;
17. Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah agar dapat jadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dasar pada tahun 2024, yang merupakan salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bojonegoro. Secara rinci maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjadi panduan bagi organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada dinas.
2. Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dinas.

Tujuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan proses pembangunan bidang Bina Marga dan Penataan Ruang dalam satu tahun kedepan.
2. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh.

3. Mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, penataan kawasan dan ruang.
4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas melalui pembangunan bidang, jalan, jembatan dan penataan ruang.
5. Mewujudkan prasarana jalan/jembatan yang andal dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan mobilitas/pergerakan orang dan barang yang bermuara pada peningkatan derajat perekonomian masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro,
- 1.2. Landasan hukum penyusunan dokumen,
- 1.3. Maksud dan tujuan penyusunan,
- 1.4. Sistematika penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun lalu.

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD,
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD,
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD,
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional,
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD,
- 3.3. Program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab V : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2023

Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum pada Tahun 2023, disimpulkan bahwa Program dan kegiatan pada tahun 2023 tercapai dengan baik. Akan tetapi belum semuanya dapat mencapai target yang direncanakan, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi di lapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai masih terdapat kekurangan, hal ini disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Capaian Indikator persentase jalan dan jembatan kondisi baik tahun 2023 sebesar 83.52 %, dari target yang direncanakan sebesar 83.00 %, atau persentase capaian target sebesar 106.63 % dengan demikian untuk indikator persentase jalan dan jembatan kondisi baik melebihi target yang sudah direncanakan.

Untuk realisasi Persentase ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2023 adalah 88.33 %, dari target yang direncanakan sebesar 90.00 % atau persentase capaian sebesar 98.14 %.

Kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target adalah mengutamakan pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi target renstra PD baik itu perencanaan maupun penganggaran.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel II.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang.

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang telah berusaha sebaik mungkin. dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian kinerja.

2.2.1. Faktor Pendorong.

1. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
2. Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme;
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor;
4. Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya;
5. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;
7. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
8. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan.

2.2.2. Faktor Penghambat.

1. Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki
2. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
3. Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses perencanaan pembangunan.
4. Kondisi tanah yang labil menyebabkan umur bangunan tidak bertahan lama.
5. Untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro bagian selatan sebagian berada di dataran tinggi sehingga rawan terjadi tanah longsor dan Banjir bandang, Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro bagian utara termasuk Kota Bojonegoro berada di sepanjang lembah Sungai Bengawan Solo yang memerlukan perhatian khusus untuk menangani banjir dan genangan air hujan di dalam Kota Bojonegoro .
6. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dan jembatan dalam mematuhi aturan lalu lintas dalam memanfaatkan prasarana yang tersedia.

Selanjutnya untuk lebih jelas melihat Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel II.2.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah. Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, khususnya bidang pembangunan jalan dan prasarana pendukungnya, bidang jembatan serta bidang tata ruang dan jasa konstruksi.

Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan. Selanjutnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Bidang Bina Marga

- a. Belum seluruhnya jalan kabupaten dalam kondisi baik.
- b. Kondisi tanah pada musim hujan akan mengalami kembang (swilling) dan mengakibatkan resiko longsor akibat rendahnya kekuatan geser tanah, sehingga menurunkan stabilitas jalan, sedangkan pada musim kemarau terjadi penurunan kadar air tanah yang menyebabkan keretakan pada badan jalan.
- c. Kerusakan Jalan selain akibat daya dukung tanah dasar yang rendah, juga diakibatkan karena pembebanan lebih, sementara struktur jalan hanya direncanakan untuk beban ganda tidak lebih dari 8 Ton (Kelas III C)
- d. Belum sepenuhnya tembok penahan tanah terbangun, sehingga masih dijumpai badan jalan yang longsor di beberapa titik.

2. Bidang Jembatan

- a. Belum sepenuhnya kondisi jembatan di Kabupaten Bojonegoro dalam kondisi baik.
- b. Kondisi cuaca yang tidak menentu bisa menghambat pelaksanaan proyek pembangunan jembatan.

- c. Bencana banjir bisa menghambat penyelesaian pelaksanaan proyek pembangunan jembatan dan mengurangi umur jembatan.

3. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

- a. Adanya Peraturan Daerah Tata Ruang terkait pembahasan aturan yang perlu segera disesuaikan/diadopsi dalam Peraturan Daerah Tata Ruang yang baru.
- b. Belum sinkronnya pembangunan dalam RPJMD dengan dokumen penataan Ruang/Peraturan Daerah Tata Ruang.
- c. Munculnya kawasan baru yang sifatnya sebagai bangkitan kawasan sehingga perlu perencanaan tata ruang sekitarnya untuk mengantisipasi multiplayer effect kawasan.
- d. Pada jasa konsultansi masih banyak penanggung jawab teknis di lapangan yang belum menguasai bidang tugasnya dan belum tersertifikasi, sehingga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk tenaga teknis lapangan agar menguasai bidang tugasnya dengan baik.
- e. Perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.

4. Sekretariat

- a. Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat.
- b. Diperlukan koordinasi internal yang kuat antar fungsi manajemen, antar Bidang Bina Jalan, Bidang Jembatan, Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi dan UPT Dinas di wilayah masing – masing.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang secara tidak langsung juga menjadi kendala terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Bojonegoro maupun terhadap capaian program nasional/internasional. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, yaitu:

Tantangan

- 1) Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki.
- 2) Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang.

- 3) Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses perencanaan pembangunan.
- 4) Kondisi tanah yang labil menyebabkan umur bangunan tidak bertahan lama.
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dan jembatan dalam memanfaatkan prasarana yang tersedia.
- 6) Masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTRW dan RDTR.

Peluang

- 1) Struktur organisasi Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 2) Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor;
- 4) Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya;
- 5) Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan;
- 6) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;
- 7) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 8) Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan;
- 9) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro yaitu : bagaimana pembangunan infrastruktur yang dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi sosial, ekonomi dan lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan). Isu ini semakin penting sejalan dengan meningkatnya kesadaran ekologi yang dipicu oleh

keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah dan apabila tidak ditangani dengan baik akan memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang dan di masa mendatang.

Isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius adalah tidak stabilnya harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Bojonegoro khususnya penganggaran terhadap bidang infrastruktur jalan dan jembatan. Terkait dengan kewenangan dalam pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan undang-undang 38 tahun 2004 tentang jalan dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk fisik.

Pentingnya seluruh jajaran ke-PU-an untuk terus meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas yang mendukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima. Untuk ini perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran ke-PU-an.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rancangan awal RKPD telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel II.3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam merencanakan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang juga menampung berbagai program/kegiatan yang diusulkan oleh berbagai pemangku kepentingan (stake holder), baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, maupun dari kelompok masyarakat yang tidak berkepentingan dengan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang seperti dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Government Organization (NGO), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Program/kegiatan yang diusulkan oleh berbagai pemangku kepentingan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, sebelum nantinya di tampung dalam Renja Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang. Tidak semua usulan dari berbagai pemangku kepentingan ditampung begitu saja, ada juga yang tidak dilaksanakan karena setelah di

verifikasi lapangan ternyata usulan tersebut dianggap tidak prioritas dan tidak dilaksanakan.

Begitu pula untuk usulan masyarakat yang masuk melalui musrenbang kecamatan, usulan tersebut akan diverifikasi secara langsung antara Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang dengan Kecamatan terkait. Usulan tersebut akan ditampung dalam Renja PD sesuai skala prioritas. Untuk usulan yang dianggap kurang prioritas akan dikembalikan ke Kecamatan pengusul dan apabila usulan tersebut dianggap prioritas oleh pihak Kecamatan maka disarankan agar dikerjakan dengan dana desa maupun dana yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada table II.4.

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023

Nama PD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marqa dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PEYELENGGARAAN JALAN	Prosentase infrastruktur kebinamargaan dalam kondisi mantap	92.95%	81.85%	86.75%		100.00%	92.95	92.95	100.00%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Infrastruktur Kebinamargaan Yang Ditangani	813.266 km	448.32 km	490.07	490.07	100.00%	336.86	302.35	89.76%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pendalaman Pengendalian	6 dokumen	3 dokumen	2	2	100.00%	4	4	100.00%
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan Yang Tersedia Untuk Penyelenggaraan Jalan	12645 m2	0	6500	0	0.00%	6145	0	0.00%
	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	5 dokumen	1 dokumen	4	4	100.00%	1	1	100.00%
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	6 dokumen	1 dokumen	4	4	100.00%	2	2	100.00%
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	104 km	39.34 km	52	52	100.00%	52	51.3	98.65%
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	33 km	10 km	10	10	100.00%	13	13	100.00%
	Rekonstruksi Jalan	panjang Jalan Yang Direkonstruksi	331.49 km	171.55 km	181	180.69	99.83%	173	140.61	81.28%
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Yang Direhabilitasi	226 km	151 km	151	151	100.00%	75	75	100.00%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	56.78 km	19.25 km	18.26	18.26	100.00%	18.26	17	93.10%
	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dibangun	120 m	28 unit	50	50	100.00%	50	40	80.00%
	Pembangunan Flyover	Panjang Flyover Yang Dibangun	600 m	0	600	0	0.00%	600	0	0.00%
	Pengantian Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dilakukan Pengantian	442 m	52 unit	200	200	100.00%	230	208.3	90.57%
	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dilakukan Pelebaran	755 m	55 unit	300	300	100.00%	400	390	97.50%
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan Yng Direhabilitasi	1200 m	17 unit	230	230	100.00%	900	892.25	99.14%
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan Yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin	280 m	14 unit	100	100	100.00%	250	150	60.00%
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan Yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	2 km	16 paket	0.6	0.6	100.00%	0.8	0.5	62.50%
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 dokumen	1 dokumen	2	2	100.00%	2	2	100.00%
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang kompeten	65.00%	32.18%	36.17	36.17	100.00%	65.00	65.00	100.00%
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Tersertifikasi	750 orang	250 orang	250	250	100.00%	250	250	100.00%
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi (peserta)	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Yang Tersertifikasi	750 orang	250 orang	250	250	100.00%	250	250	100.00%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun	5 dokumen	1 dokumen	2	2	100.00%	3	3	100.00%
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi (dokumen)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	2 dokumen	1 dokumen	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha (Dokumen)	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	5 dokumen	1 dokumen	2	2	100.00%	3	3	100.00%
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Peserta Pembinaan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	900 orang	300 orang	300	300	100.00%	300	300	100.00%
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi (peserta)	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	900 orang	300 orang	300	300	100.00%	300	300	100.00%
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	3 dokumen	1 dokumen	2	2	100.00%	1	1	100.00%
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	3 dokumen	1 dokumen	2	2	100.00%	1	1	100.00%

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun	36 dokumen	9 dokumen	12	12	100.00%	15	15	100.00%
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	36 dokumen	9 dokumen	12	12	100.00%	12	12	100.00%
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi,Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	12 dokumen	4 dokumen	4	4	100.00%	4	4	100.00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang	450 peserta	0	150	0	0.00%	150	0	0.00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Disusun	678 dokumen	218 dokumen	230	230	100.00%	230	220	95.65%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Peninjauan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKPR) dan Informasi Yang Dikeluarkan	678 dokumen	218 dokumen	230	230	100.00%	230	220	95.65%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi Terkait Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	349 kali	100 kali	147	147	100.00%	201	201	100.00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Jumlah dokumen kajian pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Peneqakan Hukum Bidang Penataan Ruang	345 dokumen	100 dokumen	145	145	100.00%	200	200	100.00%
	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Terkait Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	3 dokumen	1 dokumen	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan Pemerintahan daerah	100%	100%	100	100	100.00%	100	100.00	100.00%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Yang Disusun	21 dokumen	7 dokumen	7	7	100.00%	7	7	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1 dokumen	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	0	1	1	100.00%	2	2	100.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	3 laporan	1 laporan	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Administrasi Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Gaji dan Tunjangan nya Tersedia	72 orang/bulan	58 orang/bulan	58	58	100.00%	72	71	98.61%
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 dokumen	12 dokumen	12	12	100.00%	12	12	100.00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	6 layanan	2 layanan	2	2	100.00%	2	2	100.00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	400 orang	100 orang	100	100	100.00%	200	162	81.00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	24 orang	8 orang	8	8	100.00%	8	7	87.50%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Disusun	21 layanan	7 layanan	7	7	100.00%	7	7	100.00%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 paket	4 paket	4	4	100.00%	1	1	100.00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	3 paket	3	3	100.00%	9	9	100.00%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	2 paket	2	2	100.00%	2	2	100.00%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 paket	9 paket	9	9	100.00%	1	1	100.00%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	1 paket	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 dokumen	24 dokumen	24	24	100.00%	24	6	25.00%

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
Kabupaten Bojonegoro

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2) (5)	Tahun 2023 (thn n-1) (6)	Tahun 2024 (thn n) (7)	Tahun 2025 (thn n+1) (8)	Tahun 2022 (thn n-2) (9)	Tahun 2023 (thn n-1) (10)	Tahun 2024 (thn n) (11)	Tahun 2025 (thn n+1) (12)	
(1)	(2)	(3)	(4)									(13)
1	Persentase Jalan dan Jembatan Kondisi Baik			85.00	83.00	85.00	87.00	88.84	83.52			Target tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan target tahun 2022 dikarenakan terdapat penambahan ruas jalan kabupaten.
2	Presentase Ketaatan terhadap RTRW			88.00	89.00	91.00	93.00	88.30	88.33			

Tabel II.3
Review Terhadap Rancangan RKPd tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro
Nama PD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

Rancangan Awal RKPD 2024														Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No.	Program /Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikator (Rp.)	Program /Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikator (Rp.)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
1	PROGRAM PEYELENGGARAAN JALAN	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	Prosentase infrastruktur kebinamargaan dalam kondisi mantap	90	%	939.521.898.343.00	PROGRAM PEYELENGGARAAN JALAN	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	Prosentase infrastruktur kebinamargaan dalam kondisi mantap	90	%	883.516.539.751.00						
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Panjang Infrastruktur Kebinamargaan Yang Ditangani	260	km	939.521.898.343.00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Panjang Infrastruktur Kebinamargaan Yang Ditangani	260	km	883.516.539.751.00						
	Pengelolaan Leger Jalan	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1	Dokumen	1.000.000.000	Pengelolaan Leger Jalan	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1	Dokumen	500.000.000						
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4	Dokumen	58.331.460.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4	Dokumen	100.395.175.032						
	Penggantian Jembatan	Dinas PU BMPR	Jumlah Jembatan yang Diganti	51	Unit	31.983.887.924	Penggantian Jembatan	Dinas PU BMPR	Jumlah Jembatan yang Diganti	51	Unit	34.639.830.692						
	Pembangunan Jalan	Dinas PU BMPR	Panjang Jalan Yang Dibangun	70	km	128.790.254.710	Pembangunan Jalan	Dinas PU BMPR	Panjang Jalan Yang Dibangun	70	km	140.691.611.410						
	Rekonstruksi Jalan	Dinas PU BMPR	panjang Jalan Yang Direkonstruksi	69	km	391.807.000.000	Rekonstruksi Jalan	Dinas PU BMPR	panjang Jalan Yang Direkonstruksi	69	km	377.771.138.000						
	Pembangunan Flyover	Dinas PU BMPR	Jumlah Flyover yang Dibangun	1	Unit	103.979.240.000	Pembangunan Flyover	Dinas PU BMPR	Jumlah Flyover yang Dibangun	1	Unit	1.909.791.315						
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dinas PU BMPR	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi	195	km	200.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dinas PU BMPR	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi	195	km	200.000.000						
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Dinas PU BMPR	Penyelenggaraan Menuju Standar	10	km	2.214.450.000	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Dinas PU BMPR	Penyelenggaraan Menuju Standar	10	km	2.314.450.000						
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Dinas PU BMPR	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	100	Unit	3.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Dinas PU BMPR	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	100	Unit	1.974.084.263						
	Rehabilitasi Jembatan	Dinas PU BMPR	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	67	Unit	42.804.512.925	Rehabilitasi Jembatan	Dinas PU BMPR	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	67	Unit	46.018.586.825						
	Pembangunan Jembatan	Dinas PU BMPR	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1	Unit	14.799.567.000	Pembangunan Jembatan	Dinas PU BMPR	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1	Unit	15.208.381.315						
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dinas PU BMPR	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	813.26	km	200.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dinas PU BMPR	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	813.26	km	600.000.000						
	Rehabilitasi Jalan	Dinas PU BMPR	Panjang Jalan Yang Direhabilitasi	92	km	103.000.000.000	Rehabilitasi Jalan	Dinas PU BMPR	Panjang Jalan Yang Direhabilitasi	92	km	92.743.300.000						
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas PU BMPR	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	18.26	km	6.172.500.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas PU BMPR	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	18.26	km	5.350.594.356						
	Pelebaran Jembatan	Dinas PU BMPR	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	104	Unit	51.239.025.784	Pelebaran Jembatan	Dinas PU BMPR	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	104	Unit	63.199.596.543						

No.	Rancangan Awal RKPD 2024														Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target cabaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)			
(1)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang kompeten	65	%	5.701.508.910.00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang kompeten	65	%	5.462.994.110.00			
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Tersertifikasi	250	Orang	890.318.740.00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Tersertifikasi	250	Orang	873.818.740			
	Fasilitasi Sertifikasi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Yang Tersertifikasi	250	Orang	695.409.500	Fasilitasi Sertifikasi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Yang Tersertifikasi	250	Orang	678.909.500			
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	300	Lembaga	194.909.240	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	300	Lembaga	194.909.240			
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun	3	Dokumen	161.390.170.00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun	3	Dokumen	141.901.170			
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	3	Dokumen	98.778.880	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	3	Dokumen	98.778.880			
	Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	4	Layanan	62.611.290	Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	4	Layanan	43.122.290			
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Dokumen	4.649.800.000.00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Dokumen	4.447.274.200			
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Paket Pekerjaan yang Diawasi dan Dievaluasi	100	paket pekerjaan	49.800.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Paket Pekerjaan yang Diawasi dan Dievaluasi	100	paket pekerjaan	25.390.000			
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	200	bangunan konstruksi	4.600.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	200	bangunan konstruksi	4.421.884.200			

No.		Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Program/Kegiatan/Subkegiatan		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun	248	Dokumen	1.725.840.600.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun	248	Dokumen	1.692.815.050.00	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	4	Dokumen	899.947.900.00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	4	Dokumen	997.621.900	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	4	Dokumen	798.973.500	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	4	Dokumen	896.647.500	
	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Dinas PU BMPR	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	150	Orang	100.974.400	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Dinas PU BMPR	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	150	Orang	100.974.400	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Yang Disusun	238	Dokumen	650.960.700.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Yang Disusun	238	Dokumen	529.575.150	
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dinas PU BMPR	Jumlah Peninjauan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Informasi Yang Dikeluarkan	235	dokumen	312.530.050	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dinas PU BMPR	Jumlah Peninjauan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Informasi Yang Dikeluarkan	235	dokumen	304.810.050	
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dinas PU BMPR	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	dokumen	228.765.100	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dinas PU BMPR	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	dokumen	224.765.100	
	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Dinas PU BMPR	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	dokumen	109.665.550	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Dinas PU BMPR	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	0	dokumen	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Jumlah Koordinasi Terkait Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	12	Kali	174.932.000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PU BMPR	Jumlah Koordinasi Terkait Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	12	Kali	165.618.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Koordinasi Terkait Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	1	Dokumen	64.015.250	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Koordinasi Terkait Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	1	Dokumen	60.175.250	
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	12	Dokumen	110.916.750	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	12	Dokumen	105.442.750	

No.	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikator (Rp.)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan		Pagu indikator (Rp.)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan Pemerintahan daerah	100	%	20.086.396.004.00	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan Pemerintahan daerah	100	%	17.366.939.143.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Yang Disusun	7	Dokumen	183.902.125.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Yang Disusun	7	Dokumen	133.858.189		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	13.972.058	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	4.631.402		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	13.972.913	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	6.632.257		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	14.005.398	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.664.742		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	14.005.877	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	6.665.221		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	13.972.913	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6.632.257		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	113.972.966	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	104.632.310		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	1	Laporan	14.040.994.325.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	1	Laporan	11.154.824.520		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PU BMPR	Jumlah ASN Yang Gaji dan Tunjangannya Tersedia	72	orang/bulan	12.769.082.325	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PU BMPR	Jumlah ASN Yang Gaji dan Tunjangannya Tersedia	72	orang/bulan	10.119.592.520		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1.271.912.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1.035.232.000		

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
		Lokasi (3)	Indikator kinerja (4)	Target capaian (5)	Satuan (6)	Pagu indikatif (Rp.) (7)	Program/Kegiatan/Subkegiatan (8)	Lokasi (9)	Indikator kinerja (10)	Target capaian (11)	Satuan (12)		Pagu indikatif (Rp.) (13)	
(1)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PU BMPR	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2	Layanan	132.600.000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PU BMPR	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2	Layanan	132.600.000		(14)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	200	Orang	88.600.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	200	Orang	88.600.000		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PU BMPR	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	8	Orang	44.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PU BMPR	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	8	Orang	44.000.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PU BMPR	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Disusun	7	Layanan	1.138.718.418.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PU BMPR	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Disusun	7	Layanan	1.171.918.418		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas PU BMPR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1	paket	10.092.250	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas PU BMPR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1	paket	10.092.250		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PU BMPR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Paket	99.502.798	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PU BMPR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Paket	99.502.798		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas PU BMPR	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	24.420.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas PU BMPR	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	24.420.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas PU BMPR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	503.457.960	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas PU BMPR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	503.457.960		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PU BMPR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	53.425.410	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PU BMPR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	53.425.410		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	3.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PU BMPR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	3.600.000		
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilakukan	12	Laporan	444.220.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilakukan	12	Laporan	477.420.000		

No.	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas PU BMPR	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang diadakan	20	Unit	349.999.248.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas PU BMPR	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang diadakan	20	Unit	361.064.536	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas PU BMPR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	4	Unit	349.999.248	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas PU BMPR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	4	Unit	361.064.536	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas PU BMPR	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	48	Layanan	3.592.451.391.00	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas PU BMPR	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	48	Layanan	3.670.251.391	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat Yang Disediakan	12	laporan	4.560.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat Yang Disediakan	12	laporan	4.560.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	368.306.391	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	353.306.391	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	8.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	8.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Layanan	3.211.585.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas PU BMPR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Layanan	3.304.385.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Dinas PU BMPR	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	51	unit	647.730.497.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Dinas PU BMPR	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	51	unit	742.422.089	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas PU BMPR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibavarkan Pakainya	20	unit	244.550.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas PU BMPR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibavarkan Pakainya	20	unit	244.550.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas PU BMPR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	30	Unit	51.948.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas PU BMPR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	30	Unit	51.948.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas PU BMPR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	1	Unit	351.232.497	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas PU BMPR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	1	Unit	445.924.089	
	JUMLAH					967.035.643.857.00	JUMLAH					908.039.288.054.00	

Tabel II. 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan P-APBD Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro

Nama SKPD: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

No (1)	Program/Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran/Volume (5)	Catatan (6)
	Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan				
	Pembangunan/pemeliharaan jalan	Kab. Bojonegoro	jalan yang terbangun/direhabilitasi	0 Paket	
	Pembangunan/pemeliharaan jembatan	Kab. Bojonegoro	jembatan yang terbangun/direhabilitasi	0 Paket	
	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab. Bojonegoro	TPT yang terbangun dan Saluran drainase yang terbangun	0 Paket	
	Usulan Pembangunan melalui Pokok Pokok Pikiran Anggota DPRD				
	Pembangunan/pemeliharaan jalan	Kab. Bojonegoro	jalan yang terbangun/direhabilitasi	0 Paket	
	Pembangunan/pemeliharaan jembatan	Kab. Bojonegoro	jembatan yang terbangun/direhabilitasi	0 Paket	
	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab. Bojonegoro	TPT yang terbangun dan Saluran drainase yang terbangun	0 Paket	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang memfokuskan pembangunan pada infrastruktur, maka Renja ini juga selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur ingin mempercepat pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana di Kabupaten Bojonegoro diberbagai bidang, khususnya Bidang Jalan, Jembatan serta Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.

Fokus pembangunan pada infrastruktur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di wilayah Kabupaten Bojonegoro diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Infrastruktur jalan kabupaten dilakukan peningkatan konstruksi dari aspal menjadi beton.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro pada jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro menetapkan tujuan yaitu **“Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan dan ketaatan terhadap tata ruang”**, dengan 2 indikator :

1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
2. Persentase Kualitas Penataan Ruang

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 3 (tiga) tahun mendatang.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran, kendala, tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kebinamargaan	persentase jalan dan jembatan kondisi baik
Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain:
- Permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis Kabupaten Bojonegoro tahun 2024.
 - Pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kebinamargaan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Dengan adanya jalan dan jembatan kondisi baik, diharapkan dapat mempermudah akses transportasi barang dan manusia menuju pusat perekonomian.
 - Pengembangan daerah terisolir melalui peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta prasarana jalan terutama jalan poros desa yang ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Jumlah program yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro pada tahun 2024 adalah 4 program yang diuraikan dalam 15 kegiatan dan 50 sub kegiatan.
- Lokasi program dan kegiatan tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
 - Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pedanaannya sebesar Rp 908.039.288.054,00

- c. Tabel rencana program dan kegiatan.

Tabel rencana program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojongoro tahun 2024 dapat dilihat pada tabel III.1

Tabel III.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Nama SKPD: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju rencana tahun 2025			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	
1 03				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				908.039.288.054				1.225.101.835.147	
1 03 10				Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			90	883.516.539.751.00			92	1.201.530.012.712.00	
1 03 10 2 01				Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			260	883.516.539.751.00			272	1.201.530.012.712.00	
1 03 10 2 01 0028				Sub.kegiatan: Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1	500.000.000			1	1.000.000.000	
1 03 10 2 01 0029				Sub.kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4	100.395.175.032			1	100.000.000	
1 03 10 2 01 0031				Sub.kegiatan: Penggantian Jembatan		Jumlah Jembatan yang Diganti	51	34.639.830.692			10	10.186.750.000	
1 03 10 2 01 0032				Sub.kegiatan: Pembangunan Jalan		Panjang Jalan Yang Dibangun	70	140.691.611.410			80	215.888.312.712	
1 03 10 2 01 0033				Sub.kegiatan: Rekonstruksi Jalan		panjang Jalan Yang Direkonstruksi	69	377.771.138.000			68	403.657.000.000	
1 03 10 2 01 0035				Sub.kegiatan: Pembangunan Flyover		Jumlah Flyover yang Dibangun	1	1.909.791.315			1	227.353.000.000	
1 03 10 2 01 0036				Sub.kegiatan: Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	195	200.000.000			275	200.000.000	
1 03 10 2 01 0037				Sub.kegiatan: Pelebaran Jalan Menuju Standar		Panjang Jalan Yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	10	2.314.450.000			10	81.060.000.000	
1 03 10 2 01 0038				Sub.kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin□	100	1.974.084.263			400	3.030.000.000	
1 03 10 2 01 0039				Sub.kegiatan: Rehabilitasi Jembatan		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	67	46.018.586.825			80	41.579.350.000	
1 03 10 2 01 0040				Sub.kegiatan: Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dibangun	1	15.208.381.315			2	95.000.000.000	
1 03 10 2 01 0043				Sub.kegiatan: Survey Kondisi		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	813.26	600.000.000			1046.16	200.000.000	
1 03 10 2 01 0044				Sub.kegiatan: Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan Yang Direhabilitasi	92	92.743.300.000			94	105.000.000.000	

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju rencana tahun 2025			
1				2	3	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	
						4	5	6	7	8	9	10	
1	03	10	2	01	0046	Sub.kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jalan	18.26	5.350.594.356			272	6.272.500.000	
1	03	10	2	01	0048		104	63.199.596.543			60	11.003.100.000	
1	03	11				Sub.kegiatan: Pelebaran Jembatan							
1	03	11				Program: PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	65	5.462.994.110.00			67	5.592.833.300.00	
1	03	11	2	01		Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	250	873.818.740			200	965.120.800.00	
1	03	11	2	01	0010	Sub kegiatan: Fasilitasi Sertifikasi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Tenaga Terampil Konstruksi	250	678.909.500			200	763.950.400	
1	03	11	2	01	0011	Sub kegiatan: Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	300	194.909.240			300	201.170.400	
1	03	11	2	02		Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3	141.901.170			2	173.912.500.00	
1	03	11	2	02	0013	Sub kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	3	98.778.880			2	105.040.000	
1	03	11	2	02	0015	Sub kegiatan: Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	4	43.122.290			1	68.872.500	
						Kegiatan: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	4.447.274.200			1	4.453.800.000.00	
1	03	11	2	04		Sub kegiatan: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100	25.390.000			1	50.000.000	

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana tahun 2025	
1	2	3			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03	12	2	04	0008	Sub kegiatan: Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	12	Dokumen	105.442.750	110.916.750
1	03	01				Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan Pemerintahan daerah	100	%	100	16.493.669.630.00
1	03	01	2	01		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun	7	Dokumen	133.858.189	183.902.125.00
1	03	01	2	01	0001	Sub.kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	4.631.402	13.972.058
1	03	01	2	01	0002	Sub.kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	6.632.257	13.972.913
1	03	01	2	01	0003	Sub.kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.664.742	14.005.398
1	03	01	2	01	0004	Sub.kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	6.665.221	14.005.877
1	03	01	2	01	0005	Sub.kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6.632.257	13.972.913
1	03	01	2	01	0006	Sub.kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	104.632.310	113.972.966
1	03	01	2	02		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	1	Laporan	11.154.824.520	10.780.164.711.00
1	03	01	2	02	0001	Sub.kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Gaji dan Tunjangannya Tersedia	72	orang/bulan	10.119.592.520	9.508.252.711
1	03	01	2	02	0002	Sub.kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1.035.232.000	1.271.912.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju rencana tahun 2025		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan		Layanan	132.600.000			Layanan	108.600.000.00
1	03	01	2 05	Sub.kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		Orang	88.600.000		200	Orang	88.600.000
				Sub.kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan		Orang	44.000.000		4	Orang	20.000.000
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Disusun		Layanan	1.171.918.418		7	Layanan	1.136.718.418.00
1	03	01	2 06	Sub.kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		paket	10.092.250		1	paket	10.092.250
				Sub.kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	99.502.798		9	Paket	99.502.798
1	03	01	2 06	Sub.kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	24.420.000		2	Paket	24.420.000
				Sub.kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	503.457.960		1	paket	501.457.960
1	03	01	2 06	Sub.kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	53.425.410		1	paket	53.425.410
				Sub.kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	3.600.000		24	Dokumen	3.600.000
1	03	01	2 06	Sub.kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilakukan		Laporan	477.420.000		12	Laporan	444.220.000
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		Unit	361.064.536		4	Unit	200.000.000.00
1	03	01	2 07	Sub.kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan		Unit	361.064.536		4	Unit	200.000.000

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju rencana tahun 2025			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	03	01	2	08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub.kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan	48	Layanan	3.670.251.391	48	Layanan	3.551.476.391.00
1	03	01	2	08	0001	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat Yang Disediakan	12	laporan	4.560.000	12	laporan	4.560.000
1	03	01	2	08	0002	Sub.kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	368.306.391
1	03	01	2	08	0003	Sub.kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	8.000.000
1	03	01	2	08	0004	Sub.kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Layanan	12	Layanan	3.170.610.000
1	03	01	2	09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	51	unit	742.422.089	51	unit	532.807.985.00
1	03	01	2	09	0002	Sub.kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	unit	20	unit	244.550.000
1	03	01	2	09	0006	Sub.kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	30	Unit	30	Unit	51.948.000
1	03	01	2	09	0009	Sub.kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	1	Unit	1	Unit	236.309.985

Bojonegoro, 31 Juli 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Petataan Ruang
KABUPATEN BOJONEGORO


DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PETATAAN RUANG
KABUPATEN BOJONEGORO

RETNO WULANDARI, ST.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19761015 200212 2 006

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

- Jumlah program yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro pada tahun 2024 adalah 4 program yang diuraikan dalam 15 kegiatan dan 50 sub kegiatan..
- Lokasi program dan kegiatan tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
- Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebesar Rp 908.039.288.054,00
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi rencana program dan kegiatan disertai pendanaan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel IV.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Satuan	ALOKASI (Rp)	SUMBER DANA
PROGRAM PEYELENGGARAAN JALAN	Prosentase infrastruktur kebinamargaan dalam kondisi mantap	90.00%					883.516.539.751.00	
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Infrastruktur Kebinamargaan Yang Ditangani	260	km	883.516.539.751.00	
			Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1	Dokumen	500.000.000	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4	Dokumen	100.395.175.032	
			Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					
			Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	51	Unit	34.639.830.692	
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	70	km	140.691.611.410	
			Rekonstruksi Jalan	panjang Jalan Yang Direkonstruksi	69	km	377.771.138.000	
			Pembangunan Flyover	Jumlah Flyover yang Dibangun	1	Unit	1.909.791.315	
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	195	km	200.000.000	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	10	Unit	2.314.450.000	
			Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	100	Unit	1.974.084.263	
			Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	67	Unit	46.018.586.825	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1	km	15.208.381.315	
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Yang Direhabilitasi	813.26	km	600.000.000	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	92	km	92.743.300.000	
			Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	18.26	Unit	5.350.594.356	
		65.00%			104		63.199.596.543	
	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang kompeten						5.462.994.110.00	
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Tersertifikasi	250	Orang	873.818.740	
			Facilitasi Sertifikasi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Yang Tersertifikasi	250	Orang	678.909.500	
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	300	Lembaga	194.909.240	

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Satuan	ALOKASI (Rp)	SUMBER DANA
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun	3	Dokumen	141.901.170	
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	3	Dokumen	98.778.880	
			Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	4	Dokumen	43.122.290	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Dokumen	4.447.274.200	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100	paket pekerjaan	25.390.000	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	200	bangunan konstruksi	4.421.884.200	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun	253 dokumen			248		1.692.815.050.00	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	4	Dokumen	997.621.900	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	4	Dokumen	896.647.500	
			Sosialisasi Peraturan Perundang undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	150	Orang	100.974.400	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Disusun	238	Dokumen	529.575.150	
			Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Peninjauan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Informasi Yang Dikeluarkan	235	dokumen	304.810.050	

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Satuan	ALOKASI (Rp)	SUMBER DANA
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	dokumen	224.765.100	
			Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	0	dokumen	-	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Terkait Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	12	Kali	165.618.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Terkait Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	1	Dokumen	60.175.250	
			Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	12	Dokumen	105.442.750	
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan Pemerintahan daerah	100%					17.366.939.143.00	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun	7	Dokumen	133.858.189	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	4.631.402	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	6.632.257	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.664.742	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	6.665.221	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6.632.257	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	104.632.310	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	1	Laporan	11.154.824.520	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Gaji dan Tunjangannya Tersedia	72	orang/bulan	10.119.592.520	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1.035.232.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2	Layanan	132.600.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	200	Orang	88.600.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	8	Orang	44.000.000	

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Satuan	ALOKASI (Rp)	SUMBER DANA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Disusun	7	Layanan	1.171.918.418	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1	paket	10.092.250	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Paket	99.502.798	
	Penyediaan peralatan rumah tangga		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	24.420.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	503.457.960	
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1	paket	53.425.410	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	3.600.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilakukan	12	Laporan	477.420.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	20	Unit	361.064.536	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	4	Unit	361.064.536	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	48	Layanan	3.670.251.391	
	Penyediaan jasa surat menyurat		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat Yang Disediakan	12	laporan	4.560.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	353.306.391	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	8.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Layanan	3.304.385.000	

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Satuan	ALOKASI (Rp)	SUMBER DANA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	51	unit	742.422.089	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	unit	244.550.000	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	30	Unit	51.948.000	
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	1	Unit	445.924.089	
				Jumlah			908.039.288.054.00	

Bojonegoro, 31 Juli 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOJONEGORO



BAB V

PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja P-APBD Tahun 2024, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Bojonegoro, 31 Juli 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOJONEGORO**



RETNO WULANDARI, ST.MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19761015 200212 2 006